

**“PENYUSUNAN *BUSINESS CONTINUITY PLAN* PADA
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
BERDASARKAN ISO 22301:2019 DAN NIST SP 800-34”**

Nama Mahasiswa : Al izza Nugraza Wijaya Putra
NIM : 10201008
Dosen Pembimbing Utama : Ir. I Putu Deny A.S.P., S.Kom., M.Eng.
Dosen Pembimbing Pendamping : Hendy Indrawan Sunardi, S.Kom., M.Eng.

ABSTRAK

Business Continuity Plan (BCP) merupakan suatu rancangan dokumen untuk memastikan keberlangsungan operasional organisasi pada saat terjadi gangguan yang mengancam keberlangsungan operasional. Penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebagai pelaksana sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) untuk memberikan pelayanan yang efektif dan efisien kepada masyarakat yang dalam pelaksanaannya berpotensi menghadapi risiko seperti banjir, kehilangan data penting, hingga pencurian data yang dapat mempengaruhi operasional dan juga reputasi pada masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi potensi risiko yang ada pada pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemprov Kaltim serta menyusun dokumen BCP untuk menjaga kelangsungan operasional Pemprov Kaltim. Penelitian ini dilakukan melalui tujuh tahapan, yaitu inisiasi proyek, *Risk Assessment*, *Business Impact Analysis*, strategi mitigasi risiko, identifikasi pemicu, pembentukan tim BC/DR dan rencana komunikasi, serta pelatihan dan pengujian. Metode *Failure Modes and Effects Analysis* (FMEA) digunakan dalam mengidentifikasi risiko potensial dan menetapkan pemeringkatan tiap risiko. Penyusunan dokumen BCP ini mengikuti standar ISO 22301:2019 dan mengintegrasikan NIST SP 800-34 untuk memastikan relevansi dokumen yang dibuat akan sesuai dengan lingkup pemerintahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat tujuh belas (17) potensi risiko dan hasil penilaian terhadap dampak risiko pada *Business Impact Analysis* menunjukkan risiko yang sangat tinggi terdapat pada kategori aset layanan digital sehingga diharapkan implementasi BCP yang sesuai dengan kebutuhan dapat meningkatkan kesiapan Pemerintah Provinsi Kaltim dalam menghadapi potensi risiko yang tak terduga. Dengan demikian, BCP diharapkan dapat menjaga kelangsungan operasional Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Kata Kunci:

BCP, FMEA, ISO 22301:2019, NIST SP 800-34, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur